

## ANALISIS KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN UPAYA PENINGKATANNYA DI KABUPATEN MUARO JAMBI

Laila Kurnia

Corresponden Autor: [lailakurnia@gmail.com](mailto:lailakurnia@gmail.com)<sup>1</sup>

Universitas Muhammdiyah Jambi

**Abstrak:** Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui dan menganalisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah di Kabupaten Muaro Jambi. Kedua yaitu mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk peningkatan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder dengan metode analisis deskriptif untuk menjawab tujuan pertama, yaitu mengetahui dan menganalisis kontribusi komponen pendapatan asli daerah di Kabupaten Muaro Jambi selama periode tahun 2010-2023. Kedua yaitu mengetahui dan menganalisis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat kontribusi. Hasil analisis yang dilakukan menyimpulkan, pertama yaitu komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi secara rata-rata juga meningkat dengan masing-masing komposisi pajak daerah 48,13 persen dalam kategori “Baik”, retribusi daerah 15,26 persen dalam kategori “Kurang Baik”, laba BUMD 7,19 persen dalam kategori (Sangat Kurang Baik) dan lain-lain yang sah 29,42 persen atau kategori “Cukup Baik” dengan semua komposisi PAD mengalami peningkatan secara berfluktuasi kearah positif selama periode 2010-2023. Kedua yaitu upaya untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang komprehensif seperti optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi, pengembangan BUMD, pemanfaatan aset daerah dan pemanfaatan dana transfer serta hibah. Pendekatan ini akan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan, meningkatkan perekonomian daerah, dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Muaro Jambi kedepannya.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Dan Pendapatan Asli Daerah

**Abstract:** *The research method used is secondary data analysis with descriptive analysis methods to answer the first objective, namely knowing and analyzing the contribution of local original income components in Muaro Jambi Regency during the 2010-2023 period. Second, namely knowing and analyzing to increase the original regional income of Muaro Jambi Regency. This research was conducted using contribution tools. The results of the analysis carried out concluded, firstly, that the original regional income component of Muaro Jambi Regency also increased on average with the respective composition of regional taxes 48.13 percent, regional levies 15.26 percent, BUMD profits 7.19 percent and so on. which is valid at 29.42 with all PAD compositions experiencing a fluctuating increase in the positive direction during the 2010-2023 period. The results of the analysis carried out concluded, firstly, that the original regional income component of Muaro Jambi Regency on average also increased with each regional tax composition being 48.13 percent in the "Good" category, regional levies 15.26 percent in the "Less Good" category. BUMD profits were 7.19 percent in the (Very Poor) category and others were legally 29.42 percent or the "Quite Good" category with all PAD compositions experiencing a fluctuating increase in a positive direction during the 2010-2023 period. Second, namely efforts to increase PAD in Muaro Jambi Regency, the government must take comprehensive steps such as optimizing tax and levy revenues, developing BUMD, utilizing regional assets and utilizing transfer funds and grants. This approach will create a sustainable*

*source of income, improve the regional economy, and improve the quality of public services in Muaro Jambi Regency in the future.*

**Keywords :** *Regional Taxes, Regional Levies, BUMD Profits, Other Legitimate Income and Original Regional Income*

## **Pendahuluan**

Didalam era otonomi, pemerintah daerah memiliki kewenangan menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan keadilan dan kekhususan suatu daerah, maka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah. Potensi keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global akan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah (Radianto, 2015).

Pemberian kewenangan ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat, secara konkrit, pengaturan ini dijabarkan dengan terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Halim, 2019).

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya terus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 2016). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan dalam pemerintahan dan pembangunan daerah (Halim, 2019). Dimana dengan adanya otonomi daerah pemerintah diharapkan dapat memenuhi tanggungjawabnya dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus selalu dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga memperbesar tersediannya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka pemerintah Kabupaten Muaro Jambi setiap tahunnya berusaha memperbaiki pemerintahan dan rumah tangganya agar lebih baik lagi.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sangat menyadari bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sangat besar sehingga pada gilirannya pemerintah daerah akan kehilangan kemandiriannya. Oleh karena itu tidak ada jalan lain terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah dan melihat secara jeli peluang-peluang yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah ini dimaksud untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada dengan terus menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang potensial dan memungkinkan untuk dapat dipungut pajak dan retribusinya. Besaran pendapatan asli daerah

pada akhirnya akan memberikan sumbangan yang cukup besar bagi komposisi APBD (Mahmudi, 2019).

Namun permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber potensial daerah untuk meningkatkan PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap alokasi belanja daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu berkisar 10 persen hingga 50 persen. Ada daerah yang besar pendapatan provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10 persen. Penerimaan pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan PAD sebagai sumber pendapatan dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi, karena terjadinya perbedaan jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi (Ariwibowo, 2015).

Dalam prakteknya pendapatan asli daerah berhubungan dengan alokasi belanja daerah, namun peningkatan realisasi anggaran belanja daerah yang besarnya tidak diikuti dengan besarnya kontribusi pendapatan asli daerah setiap tahunnya. Hal ini karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang belum mampu membiayai sepenuhnya alokasi belanja daerah terutama alokasi belanja langsung. Meskipun daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya berupa alokasi belanja daerah secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah tidak lain adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah (Mardiasmo, 2018).

Realitas menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat, dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya, pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya. Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah, namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah (Simanjuntak. A, 2019).

Pada akhirnya pemerintah akan melakukan transfer dana. Transfer dana ini berupa dana perimbangan. Dana perimbangan adalah pengeluaran alokatif anggaran pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Kuncoro (2018), juga menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen. Kemandirian bagi daerah belum sepenuhnya terlaksana, karena mereka masih menggantungkan dengan adanya aliran dana dari pemerintah pusat.

Meskipun pendapatan asli daerah diharapkan menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah terutama alokasi belanja daerah pada saat ini kondisinya masih sangat kurang memadai, sebagaimana yang tergambar pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi  
Tahun 2017-2023**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)</b>	<b>Perkembangan (Persen)</b>
1	2017	81.820.146.262	-
2	2018	90.305.498.363	10,37
3	2019	93.794.601.240	3,86
4	2020	92.797.887.531	-1,06
5	2021	110.745.449.486	19,34
6	2022	108.404.140.469	-2,11
7	2023	97.252.949.415	-10,29
	<b>Rata-Rata</b>	<b>96.445.810.395</b>	<b>3,35</b>

Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi, 2024 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara rata-rata PAD mengalami peningkatan sebesar 3,35 persen atau rata-rata sebesar Rp. 96.445.810.395 selama periode 2017-2023. Dimana pendapatan asli daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 81.820.146.262 hingga 2023 pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi menjadi Rp. 97.252.949.415. Peningkatan pendapatan asli daerah tertinggi terjadi di tahun 2021 yaitu terjadi peningkatan sebesar 19,34 persen atau sebesar Rp. 110.745.449.486. Dari data tersebut, penyebab meningkatnya pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi karena adanya kenaikan harga komoditi ekspor terutama sektor perkebunan sawit dan tumbuhnya ekonomi daerah. Menyebabkan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi juga meningkat. Sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi juga meningkat.

Sedangkan peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu menurun sebesar 10,29 persen. Sehingga pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp. 97.252.949.415. Rendahnya penerimaan PAD disebabkan adanya pelemahan mata uang rupiah terhadap beberapa mata uang asing tujuan ekspor yang dapat menyebabkan harga naik. Sehingga dapat menurunkan pendapatan masyarakat, sehingga kewajiban masyarakat terhadap pajak maupun retribusi daerah menjadi lemah. Dengan demikian akan berdampak pada penurunan PAD. Berkaitan dengan hal itu, strategi upaya peningkatan PAD memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi PAD hendaknya lebih ditingkatkan (Abimanyu, 2014). Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah, berupa pendapatan asli daerah, diharapkan daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan yang diharapkan oleh masyarakat. Untuk itu penelitian ini tentang: “Analisis Komponen Pendapatan Asli Daerah Dan Upaya Peningkatannya Di Kabupaten Muaro Jambi”.

### **Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif dengan maksud untuk menganalisis, menginterpretasikan, atau mengevaluasi informasi yang telah tersedia

sebelumnya (data sekunder) guna menjawab pertanyaan penelitian atau mengkaji suatu permasalahan.

**Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Sumber data yang digunakan terdiri dari, 1) APBD Kabupaten Muaro Jambi periode 2010-2023. 2) PDRB Kabupaten Muaro Jambi periode 2010-2023. 3) Muaro Jambi dalam angka 2010-2023. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS Kabupaten Muaro Jambi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kabupaten Muaro Jambi.

**Metode Analisis Data**

**1. Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah**

Untuk Kajian hipotesis pertama untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah Kabupaten Muaro Jambi. Kontribusi tersebut dapat dihitung dengan rumus (Abimanyu, 2014) :

$$K_{KPAD} = \frac{KPAD}{PAD} \times 100 \%$$

Dimana :

KKPAD = Kontribusi Pendapatan Asli Daerah

KPAD = Komponen Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba BUMD Dan Pendapatan Lain- Lain Yang Sah)

PAD = Pendapatan Asli Daerah

t = waktu

Berikut kriteria dari kontribusi berdasarkan pendapat Jirina & Suherty (2023) :

**Tabel 2. Kriteria Kontribusi**

<b>Presentasi</b>	<b>Kriteria</b>
Kurang dari 10,00	Sangat Kurang Baik
10,01-20,00	Kurang Baik
20,01-30,00	Cukup Baik
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
Lebih dari 50,00	Sangat Baik

Sumber : Jirina & Suherty, (2023)

**2. Analisis Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Untuk merumuskan upaya peningkatan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah maka dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui studi literatur berbagai teori, penelitian lain yang serumpun, kajian serta peraturan dan kebijakan yang terkait. Serta penyusunan dokumen strategi peningkatan belanja daerah di Kabupaten Muaro Jambi.

**Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah**

Adapun gambaran kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2010-2023. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
- 2) Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.
- 3) Hasil penjualan milik daerah/BUMD dan hasil pengelolaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain PAD yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti : jasa giro.

Adapun gambaran komposisi pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap PAD pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2010-2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

#### **1. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD**

Adapun gambaran kontribusi pajak daerah terhadap PAD pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2010-2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi**

<b>Tahun</b>	<b>Pajak Daerah (Rupiah)</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)</b>	<b>Kontribusi Pajak Daerah (Persen)</b>	<b>Kriteria</b>
	(1)	(2)	(3)	
2010	4.266.277.635	16.831.072.968	25,35	Cukup Baik
2011	11.420.845.906	28.221.739.705	40,47	Baik
2012	15.787.557.562	36.387.016.128	43,39	Baik
2013	21.577.821.596	48.531.323.405	44,46	Baik
2014	23.175.999.492	61.631.058.802	37,60	Sedang
2015	23.057.585.835	63.662.790.891	36,22	Sedang
2016	28.272.448.176	60.630.301.196	46,63	Baik
2017	44.941.979.577	77.926.789.369	57,67	Sangat Baik
2018	47.986.703.656	90.305.498.363	53,14	Sangat Baik
2019	50.584.833.573	93.794.601.240	53,93	Sangat Baik
2020	54.187.881.584	92.797.887.531	58,39	Sangat Baik
2021	61.336.706.678	110.745.449.486	55,39	Sangat Baik
2022	65.410.845.393	108.274.810.236	60,41	Sangat Baik
2023	59.064.559.415	97.252.949.415	60,73	Sangat Baik
Rata-Rata	36.505.146.148	70.499.520.624	48,13	Baik

Sumber BPS Kabupaten Muaro Jambi (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut secara keseluruhan dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Muaro Jambi cukup besar dengan rata-rata 48,13 persen dengan kategori “Baik” selama periode tahun 2010 hingga tahun 2023. Dapat terlihat kontribusi pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD terbesar yang sangat potensial untuk dapat dioptimalkan. Hal ini diharapkan memberikankan hasil yang positif pada peningkatan PAD, sehingga pemerintah daerah mampu menjalani otonomi daerah dan dapat mengurangi ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat. Sehingga diharapkan kondisi ekonomi makro pemerintah daerah dimasa datang akan lebih baik lagi dan maju.

Berdasarkan tabel 5.1 diatas terlihat juga selama periode tahun 2010-2023, kontribusi pajak daerah terhadap PAD terendah terjadi pada tahun 2010 dengan besar sumbangsi pajak daerah terhadap PAD hanya sebesar 25,35 persen atau pada kategori “Cukup Baik”. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian daerah tahun 2010 tidak stabil akibat dari rendahnya realisasi penerimaan perpajakan tersebut terjadi berkaitan dengan menyempitnya basis pajak sehubungan dengan lebih rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan besar kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap PAD sebesar 60,73 persen atau dalam kategori “Sangat Baik”. Dalam hal ini di tahun 2023 terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan potensi daerah melalui berbagai cara diantaranya untuk dapat menarik sumber penerimaan daerah melalui langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi adalah melalui pemungutan pajak yang potensial.

## 2. Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD

Adapun gambaran kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2010-2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Berdasarkan tabel 4 dibawah ini, secara keseluruhan dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Muaro Jambi cukup besar dengan rata-rata 15,26 persen atau dalam kategori “Kurang Baik” selama periode tahun 2010 hingga tahun 2023. Dapat terlihat kontribusi retribusi daerah sebagai sumber penerimaan PAD sangat potensial untuk dapat dioptimalkan. Sehingga diharapkan kondisi ekonomi makro pemerintah daerah dimasa datang akan lebih baik lagi dan maju.

**Tabel 4. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi**

Tahun	Retribusi Daerah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Kontribusi Retribusi Daerah (Persen)	Kriteria
	(1)	(2)	(3)	
2010	5.916.916.451	16.831.072.968	35,15	Sedang
2011	4.832.735.311	28.221.739.705	17,12	Kurang Baik
2012	5.955.016.683	36.387.016.128	16,37	Kurang Baik
2013	7.607.696.797	48.531.323.405	15,68	Kurang Baik

2014	12.423.372.584	61.631.058.802	20,16	Cukup Baik
2015	11.611.637.780	63.662.790.891	18,24	Kurang Baik
2016	11.506.098.846	60.630.301.196	18,98	Kurang Baik
2017	10.898.113.532	77.926.789.369	13,99	Kurang Baik
2018	9.919.704.163	90.305.498.363	10,98	Kurang Baik
2019	12.666.247.686	93.794.601.240	13,50	Kurang Baik
2020	11.407.440.631	92.797.887.531	12,29	Kurang Baik
2021	9.046.788.566	110.745.449.486	8,17	Sangat Kurang Baik
2022	3.614.113.880	108.274.810.236	3,34	Sangat Kurang Baik
2023	9.391.810.000	97.252.949.415	9,66	Sangat Kurang Baik
Rata-Rata	9.056.978.065	70.499.520.624	15,26	Kurang Baik

Sumber: BPS Kabupaten Muaro Jambi (data diolah)

Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD terendah terjadi pada tahun 2022 dengan besar sumbangsi retribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 3,34 persen atau dalam kategori “Sangat Kurang Baik”. Hal ini dikarenakan tahun 2022 tidak stabil akibat dari rendahnya sumbangsih retribusi mungkin juga disebabkan oleh kendala dalam mekanisme pemungutan dan pengawasan retribusi. Jika penarikan retribusi tidak berjalan efektif, baik karena keterbatasan sumber daya atau lemahnya koordinasi, maka realisasi penerimaan dari retribusi akan lebih rendah dari yang diharapkan. Sehingga berdampak menyempitnya basis penerimaan daerah sehubungan dengan lebih rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan besar kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap PAD sebesar 35,15 persen atau dalam kategori “Sedang”. Pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan potensi daerah melalui berbagai cara diantaranya untuk dapat menarik sumber penerimaan daerah melalui langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi adalah melalui pemungutan objek retribusi daerah yang potensial.

### 3. Analisis Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap PAD

Adapun gambaran kontribusi laba BUMD terhadap PAD pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2010-2023 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 5. Kontribusi Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi**

Tahun	Laba BUMD(Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Kontribusi LabaBUMD (Persen)	Kriteria
	(1)		(3)	
2010	2.230.415.064		13,25	Kurang Baik
2011	3.904.745.564	28.221.739.705	13,84	Kurang Baik
2012	2.924.528.405		8,04	Sangat Kurang Baik
2013	2.567.612.119		5,29	Sangat Kurang Baik
2014	2.719.792.113		4,41	Sangat Kurang Baik

2015	3.623.343.873		5,69	Sangat Kurang Baik
2016	3.656.839.959		6,03	Sangat Kurang Baik
2017	5.372.333.651		6,89	Sangat Kurang Baik
2018	5.834.257.013	90.305.498.363	6,46	Sangat Kurang Baik
2019	5.834.319.437	93.794.601.240	6,22	Sangat Kurang Baik
2020	5.648.062.163	92.797.887.531	6,09	Sangat Kurang Baik
2021	5.977.944.500	110.745.449.486	5,40	Sangat Kurang Baik
2022	6.697.105.442	108.274.810.236	6,19	Sangat Kurang Baik
2023	6.700.000.000	97.252.949.415	6,89	Sangat Kurang Baik
Rata-Rata	4.549.378.522	70.499.520.624	7,19	Sangat Kurang Baik

Sumber: BPS Kabupaten Muaro Jambi (data diolah)

Berdasarkan tabel 5 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa kontribusi laba BUMD terhadap PAD Kabupaten Muaro Jambi sangat rendah dengan rata-rata 7,19 persen atau dalam kategori “Sangat Kurang Baik” selama periode tahun 2010 hingga tahun 2023. Dapat terlihat kontribusi laba BUMD sebagai sumber penerimaan PAD kurang untuk dapat dioptimalkan. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah daerah seyogyanya dapat meningkatkan laba BUMD dimasa yang akan datang.

Kontribusi laba BUMD terhadap PAD terendah terjadi pada tahun 2014 dengan besar sumbangsi laba BUMD terhadap PAD hanya sebesar 4,41 persen atau dalam kategori “Sangat Kurang Baik”. Hal ini dikarenakan kondisi BUMD Kabupaten Muaro Jambi belum dikelola dan dioptimalkan penerimaannya dengan baik. Namun kebanyakan BUMD mengalami kerugian, dikarenakan manajemen yang tidak efektif, seperti penempatan individu yang tidak kompeten dan adanya unsur politis dalam penentuan posisi, menjadi penyebab utama kerugian BUMD. Misalnya, dalam perusahaan daerah pengelola air bersih, penempatan manajer tanpa latar belakang atau keahlian di bidang tersebut dapat menyebabkan keputusan strategis yang tidak tepat. Maka demikian wajar saja kontribusi BUMD terhadap PAD tidak terlalu besar.

Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan besar kontribusi yang diberikan laba BUMD terhadap PAD sebesar 13,84 persen atau dalam kategori “Kurang Baik”. Dalam hal ini dapat dilihat laba BUMD belum dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan yang potensial.

#### **4. Analisis Kontribusi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap PAD**

Adapun gambaran kontribusi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap PAD pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2010-2023 sebagaimana terlihat pada:

**Tabel 6. Kontribusi Pendapatan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Muaro Jambi**

Tahun	Pendapatan Lain-Lain Yang Sah (Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)	Kontribusi Pendapatan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah (Persen)	Kriteria
	(1)	(2)	(3)	
2010	4.417.463.818	16.831.072.968	26,25	Cukup Baik
2011	8.063.412.924	28.221.739.705	28,57	Cukup Baik
2012	11.719.913.479	36.387.016.128	32,21	Sedang
2013	16.778.192.893	48.531.323.405	34,57	Sedang
2014	23.311.894.614	61.631.058.802	37,82	Sedang
2015	25.370.223.403	63.662.790.891	39,85	Sedang
2016	17.194.914.216	60.630.301.196	28,36	Cukup Baik
2017	16.714.362.609	77.926.789.369	21,45	Cukup Baik
2018	26.564.833.531	90.305.498.363	29,42	Cukup Baik
2019	24.709.200.544	93.794.601.240	26,34	Cukup Baik
2020	21.554.503.153	92.797.887.531	23,23	Cukup Baik
2021	34.384.009.742	110.745.449.486	31,05	Sedang
2022	32.552.745.521	108.274.810.236	30,06	Sedang
2023	22.096.580.000	97.252.949.415	22,72	Cukup Baik
Rata-Rata	20.388.017.889	70.499.520.624	29,42	Cukup Baik

Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi (data diolah)

Berdasarkan tabel 6 secara keseluruhan dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap PAD Kabupaten Muaro Jambi dengan rata-rata 29,42 persen atau dalam kategori “Cukup Baik” selama periode tahun 2010 hingga tahun 2023. Kontribusi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap PAD terendah terjadi pada tahun 2017 dengan besar sumbangsi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap PAD hanya sebesar 21,45 persen atau dalam kategori “Cukup Baik”. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap PAD sebesar 39,85 persen atau dalam kategori “Sedang”. Dalam hal ini dapat dilihat Pendapatan Lain-Lain Yang Sah belum dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan yang potensial.

### **5. Rekapitulasi Komponen Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu elemen penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari potensi ekonomi daerah itu sendiri yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah. Berikut adalah rekapitulasi komponen utama PAD Kabupaten Muaro Jambi yang biasa dilihat pada:

**Tabel 7. Rekapitulasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Muaro Jambi**

Tahun	Komposisi Pendapatan Asli Daerah			
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
2010	25,35	35,15	13,25	26,25
2011	40,47	17,12	13,84	28,57
2012	43,39	16,37	8,04	32,21
2013	44,46	15,68	5,29	34,57
2014	37,60	20,16	4,41	37,82
2015	36,22	18,24	5,69	39,85
2016	46,63	18,98	6,03	28,36
2017	57,67	13,99	6,89	21,45
2018	53,14	10,98	6,46	29,42
2019	53,93	13,50	6,22	26,34
2020	58,39	12,29	6,09	23,23
2021	55,39	8,17	5,40	31,05
2022	60,41	3,34	6,19	30,06
2023	60,73	9,66	6,89	22,72
Rata-Rata	48,13	15,26	7,19	29,42

Sumber : BPS Kabupaten Muaro Jambi (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat selama periode tahun 2010-2023, komposisi pajak daerah terhadap PAD terendah terjadi pada tahun 2010 dengan besar sumbangsi pajak daerah terhadap PAD hanya sebesar 25,35 persen atau kategori “Cukup Baik”. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian daerah tahun 2010 tidak stabil akibat dari perekonomian yang kurang stabil sehingga rendahnya realisasi penerimaan perpajakan tersebut terjadi berkaitan dengan menyempitnya basis pajak sehubungan dengan lebih rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan besar kontribusi yang diberikan pajak daerah terhadap PAD sebesar 60,75 persen atau dalam kategori “Sangat Baik”. Dalam hal ini di tahun 2023 terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan potensi daerah melalui berbagai cara diantaranya untuk dapat menarik sumber penerimaan daerah melalui langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi adalah melalui pemungutan pajak yang potensial.

Namun secara keseluruhan dapat dilihat bahwa komposisi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Muaro Jambi cukup besar dengan rata-rata 48,13 persen atau dalam kategori “Baik” selama periode tahun 2010 hingga tahun 2023. Dapat terlihat kontribusi pajak daerah sebagai sumber penerimaan PAD terbesar yang sangat potensial untuk dapat dioptimalkan. Hal ini diharapkan memberikankan hasil yang positif pada peningkatan PAD, sehingga pemerintah daerah mampu menjalani otonomi daerah dan dapat mengurangi ketergantungan keuangan pada pemerintah pusat. Sehingga diharapkan kondisi ekonomi makro pemerintah daerah dimasa datang akan lebih baik lagi dan maju.

Sedangkan untuk mengetahui sejauh mana peranan retribusi daerah Kabupaten Muaro Jambi terhadap pendapatan asli daerah, maka dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah melalui alat analisis kontribusi. Adapun gambaran kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2010-2023 sebagaimana terlihat pada tabel atas, komposisi retribusi daerah terhadap PAD terendah terjadi pada tahun 2022 dengan besar sumbangsi retribusi daerah terhadap PAD hanya sebesar 3,34 persen. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian daerah tahun 2022 tidak stabil akibat dari rendahnya realisasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan komposisi tertinggi retribusi daerah terjadi pada tahun 2010 dengan besar kontribusi yang diberikan retribusi daerah terhadap PAD sebesar 35,15 persen atau dalam kategori “Sedang”.

Dalam hal ini di tahun 2010 terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan potensi daerah melalui berbagai cara diantaranya untuk dapat menarik sumber penerimaan daerah melalui langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan daerah Kabupaten Muaro Jambi adalah melalui retribusi daerah yang potensial. Namun secara keseluruhan dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Muaro Jambi cukup besar dengan rata-rata 15,26 persen atau dalam kategori “Kurang Baik” selama periode tahun 2010 hingga tahun 2023.

Selain itu untuk komposisi laba BUMD terhadap PAD pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2010-2023 sebagaimana terlihat pada tabel 5.5 diatas. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa komposisi laba BUMD terhadap PAD Kabupaten Muaro Jambi sangat rendah dengan rata-rata 7,19 persen atau kategori “Sangat Kurang Baik” selama periode tahun 2010 hingga tahun 2023.

Dapat terlihat kontribusi laba BUMD sebagai sumber penerimaan PAD kurang untuk dapat dioptimalkan. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah daerah seyogyanya dapat meningkatkan laba BUMD dimasa yang akan datang.

Komposisi laba BUMD terhadap PAD terendah terjadi pada tahun 2014 dengan besar sumbangsi laba BUMD terhadap PAD hanya sebesar 4,41 persen atau dalam kategori “Sangat Kurang Baik”. Hal ini dikarenakan kondisi BUMD Kabupaten Muaro Jambi belum dikelola dan dioptimalkan penerimaannya dengan baik. Namun kebanyakan BUMD mengalami kerugian, dikarenakan cenderung penerimaan dari BUMD digunakan untuk kegiatan bakti sosial untuk meminta sumbangan dalam berbagai kegiatan pemerintah menjelang pemilu daerah Kabupaten Muaro Jambi di tahun 2014. Sehingga menyebabkan sulit maju dan berkembangnya BUMD, maka demikian wajar saja kontribusi BUMD terhadap PAD tidak terlalu besar. Namun untuk komposisi tertinggi terjadi pada tahun 2011 dengan besar kontribusi yang diberikan laba BUMD terhadap PAD sebesar 11,84 persen atau dalam kategori “Kurang Baik”. Dalam hal ini dapat dilihat laba BUMD belum dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan yang potensial.

Adapun gambaran komposisi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap PAD pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun 2010-2023 sebagaimana terlihat pada tabel 5.5 diatas. Dapat dilihat bahwa komposisi Pendapatan Lain- Lain Yang Sah terhadap PAD Kabupaten Muaro Jambi dengan rata-rata 29,42 persen atau dalam kategori “Cukup

Baik” selama periode tahun 2010 hingga tahun 2023. Komposisi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap PAD terendah terjadi pada tahun 2017 dengan besar sumbangsi Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap PAD hanya sebesar 21,45 persen atau dalam kategori “Cukup Baik”. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah terhadap PAD sebesar 39,85 persen atau dalam kategori “Sedang”. Dalam hal ini dapat dilihat Lain-Lain Pendapatan Yang Sah belum dapat dioptimalkan sebagai sumber penerimaan yang potensial.

### **Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil, kontribusi terbesar dalam peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi yaitu dari sumbangsi pajak daerah yaitu sebesar 48,13 persen (kategori Baik) dan di ikuti sumbangsi retribusi daerah sebesar 15,26 persen (Kurang Baik), laba BUMD sebesar 7,19 persen (Sangat Kurang Baik) serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar 29,42 persen (Cukup Baik). Untuk itu dapat dilakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui analisis komponen PAD yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Pajak Daerah (48,13 Persen/ Kategori Baik)**

Pajak daerah memberikan kontribusi terbesar, sehingga perlu dioptimalkan dengan cara berikut:

- a) Peningkatan basis pajak: mengidentifikasi objek pajak baru yang belum tercatat secara optimal untuk memperluas basis pajak di Kabupaten Muaro Jambi.
- b) Digitalisasi sistem pemungutan pajak: menerapkan teknologi informasi untuk memudahkan pembayaran pajak secara online, meminimalkan kebocoran pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Muaro Jambi.
- c) Sosialisasi dan edukasi pajak: melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai kewajiban pajak serta manfaatnya, guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
- d) Peningkatan penegakan hukum: tindakan tegas terhadap penunggak pajak, serta penerapan sanksi yang efektif bagi pelanggar, guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.

#### **2. Retribusi Daerah (15,26 Persen/Kategori Kurang Baik)**

Retribusi daerah memiliki potensi untuk ditingkatkan, terutama dalam layanan publik. Upaya yang bisa dilakukan adalah:

- a) Perluasan layanan retribusi: meningkatkan jenis layanan publik yang dikenakan retribusi, seperti parkir, kebersihan, layanan kesehatan, dan izin usaha. Pemerintah dapat meninjau kembali potensi retribusi dari layanan yang belum dioptimalkan.
- b) Reformasi tarif retribusi: meninjau ulang dan memperbarui tarif retribusi sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lokal. Namun, penyesuaian tarif harus tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat dan daya saing daerah.
- c) Perbaiki pelayanan publik: meningkatkan kualitas layanan yang dikenakan retribusi (seperti pelayanan kesehatan, pengelolaan pasar, izin usaha) agar masyarakat lebih bersedia membayar tarif retribusi yang lebih tinggi.

- d) Penggunaan sistem digital: implementasi sistem retribusi elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam membayar retribusi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan.

### **3. Laba BUMD (7,19 Persen/Kategori Sangat Kurang Baik)**

Meskipun kontribusinya lebih kecil, pendapatan dari BUMD masih bisa ditingkatkan melalui strategi:

- a) Optimalisasi kinerja BUMD: meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Badan Usaha Milik Daerah agar lebih kompetitif dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Audit manajemen secara berkala dapat memastikan BUMD berjalan dengan optimal.
- b) Diversifikasi usaha BUMD: mengembangkan usaha BUMD di sektor- sektor yang memiliki potensi tinggi, seperti pariwisata, perumahan, atau energi terbarukan. Diversifikasi ini akan meningkatkan pendapatan BUMD secara keseluruhan.
- c) Kerjasama dengan pihak swasta: mendorong kerjasama strategis dengan sektor swasta untuk mendorong investasi, terutama dalam proyek- proyek infrastruktur atau layanan publik yang dikelola BUMD.

### **4. Lain-Lain Pendapatan yang Sah (29,42 Persen/Kategori Cukup Baik)**

Komponen ini mencakup berbagai sumber pendapatan yang tidak termasuk pajak, retribusi, atau BUMD, yang masih bisa dioptimalkan:

- a) Penjualan aset daerah yang tidak terpakai: pemerintah daerah dapat melakukan audit terhadap aset-aset yang tidak produktif dan menjualnya untuk meningkatkan pendapatan.
- b) Pengelolaan dana investasi daerah: optimalisasi pengelolaan dana investasi, seperti melalui penempatan dana di instrumen investasi yang memberikan imbal hasil tinggi namun tetap aman dan sesuai dengan regulasi.
- c) Kerjasama dengan pihak ketiga: pemerintah daerah dapat memanfaatkan kerjasama dengan sektor swasta melalui mekanisme public-private partnership (PPP) untuk mengelola aset atau proyek-proyek daerah yang memiliki potensi menghasilkan pendapatan.

Upaya lanjutan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Muaro Jambi secara umum:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan memperluas basis pajak serta menguatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum membayar atau menghindari kewajiban pajaknya. Penegakan sanksi tegas bisa menjadi cara untuk meningkatkan disiplin dalam pembayaran pajak.
2. Peningkatan penerimaan retribusi daerah dengan meninjau dan memperbarui tarif retribusi, serta menambah jenis layanan yang dikenakan retribusi, misalnya dengan mengenakan retribusi pada kegiatan pariwisata, izin usaha, dan lainnya.
3. Optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang ada. Jika diperlukan, pemerintah bisa merestrukturisasi BUMD yang tidak produktif dan memperbaiki manajemen

untuk meningkatkan efisiensi operasional. Serta mendorong BUMD untuk bekerja sama dengan pihak swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP). Kerjasama ini bisa membantu memperbesar kapasitas dan modal BUMD, sehingga keuntungan yang diperoleh bisa lebih besar.

4. Pemanfaatan aset daerah secara optimal dengan perlu melakukan inventarisasi aset-aset yang dimiliki untuk memastikan bahwa semuanya tercatat dengan baik dan digunakan secara optimal. Serta aset-aset yang belum dimanfaatkan secara produktif bisa disewakan kepada pihak swasta untuk kegiatan komersial atau dipakai sebagai lahan investasi. Ini bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah. Mengajukan program- program pembangunan yang prioritas dan relevan untuk mendapatkan alokasi dana transfer pusat yang lebih besar, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Dengan fokus pada penguatan masing-masing komponen PAD seperti yang dijelaskan di atas, Kabupaten Muaro Jambi diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara signifikan dalam waktu yang lebih cepat dan lebih efektif.

### **Kesimpulan**

Dapat disimpulkan sebagai berikut, 1) Komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi secara rata-rata juga meningkat dengan masing-masing komposisi pajak daerah 48,13 persen dalam kategori “Baik”, retribusi daerah 15,26 persen dalam kategori “Kurang Baik”, laba BUMD 7,19 persen dalam kategori (Sangat Kurang Baik) dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah 29,42 persen atau kategori “Cukup Baik” dengan semua komposisi PAD mengalami peningkatan secara berfluktuasi kearah positif selama periode 2010-2023. 2) Upaya untuk meningkatkan PAD di Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang komprehensif seperti optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi, pengembangan BUMD, pemanfaatan aset daerah dan pemanfaatan dana transfer serta hibah. Pendekatan ini akan menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan, meningkatkan perekonomian daerah, dan meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Muaro Jambi kedepannya. Saran dari hasil penelitian ini yakni, 1) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muaro Jambi melalui pajak daerah dan sumber lain yang sah, berikut adalah beberapa saran strategis yang dapat diterapkan: Pemetaan dan Pendataan Wajib Pajak: Lakukan pemetaan dan pendataan yang lebih detail terhadap objek dan subjek pajak di Kabupaten Muaro Jambi, seperti tanah, bangunan, dan pelaku usaha. Ini membantu mengidentifikasi wajib pajak potensial yang belum terdaftar. Selanjutnya Digitalisasi Sistem Pajak: Buat sistem pajak berbasis digital untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak dan meningkatkan transparansi. Teknologi ini juga bisa mempercepat proses pendataan dan pengumpulan pajak. 3). Peningkatan Kepatuhan Pajak: Lakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Berikan insentif atau penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, seperti potongan pajak atau sertifikat penghargaan. 2) Tingkatkan pengawasan terhadap objek pajak dan retribusi agar tidak terjadi kebocoran. Manfaatkan sistem audit untuk memastikan akurasi dan kepatuhan pembayaran pajak. Terapkan sanksi yang tegas

namun adil terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Pastikan bahwa tindakan penegakan hukum tersebut diiringi dengan upaya edukatif agar kesadaran masyarakat meningkat. Dan tingkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pajak daerah melalui pelatihan yang berkesinambungan agar petugas pajak memiliki kompetensi yang lebih baik. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan PAD Kabupaten Muaro Jambi dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Abimanyu. (2014). Kebijakan Fiskal dan Efektivitas Stimulus Fiskal di Indonesia, Jurnal Ekonomi Indonesia, Vol 1.
- Ariwibowo, T. (2015). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi, 11, 335–344.
- Arsyad, Lincolin, (2016). Ekonomi Pembangunan. UPP STIM YKPN.
- Halim, A. (2019). Buku Pengelolaan Keuangan Daerah (UPP STIM YPKN). Henny A. Manafe, dkk (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan
- Kuncoro, M. (2018). Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2019). Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit STIM YPKN
- Mardiasmo. (2018). Buku Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi.
- Radianto, Elia, (2015), Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II Suatu Studi Di Maluku, Prisma, VOL.IX, No. 3. 24-37.
- Simanjuntak. A. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah. Jurnal Manajemen. Volume 5, Nomor 2.

<https://www.bps.go.id/id>